

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DESA

**(Studi Kasus Desa Tanjung Buaya. Kecamatan Bolangitang Barat.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**

Oleh

BASIR ILYAS

NIM: 221 413 066

Telah diperiksa & disetujui

Pembimbing I



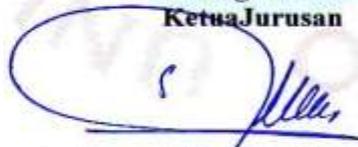
Dr. Jusdin Puluhulawa. M.Si
Nip. 196010101987031 021

Pembimbing II



Roni Lukum. S.Pd, M.Sc
Nip. 197303232000031 002

**Mengetahui
Ketua Jurusan**



Asmun W. Wantu. S.Pd, M.Sc
Nip. 19780712 2005012 004

LEMBANR PENEKSAHAN

Skripsi Yang Berjudul

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DESA

(Studi Kasus Desa Tanjung Buaya, Kec. Bolangitang, Kab. Bolmut)

Oleh

BASIR ILYAS

NIM: 221 413 066

Telah Di Pertahankan Di Depan Penguji

Hari/Tanggal: Rabu 23 November 2018

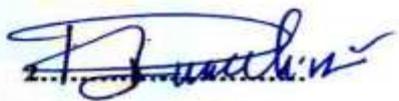
Waktu: 01.00 WITA s/d Selesai

Dewan Penguji

Dr.Hj.Lucyane Djafar, M.Pa
Nip. 196811062000032001

1.....


Ramli Mahmud, S.Pd, M.A
Nip. 198205032015041002

2.....


Dr.Jusdin Puluhulawa, M.Si
Nip. 196010101987031 021

3.....


Roni Lukum, S.Pd, M.Sc
Nip. 197303232000031 002

4.....


Gorontalo, Desember 2018

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo**


Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si
Nip. 19660903 199603 1001

ABSTRAK

BASIR ILYAS. NIM : (221413066) 2018. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DESA (Studi Kasus Desa Tanjung Buaya. Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolmut)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I, Dr. Jusdin Puluhulawa, M.Si dan Pembimbing II : Roni Lukum, S.Pd., M.Sc. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepala desa dalam mengelola anggaran Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa pada desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berjalan efektif. Dimana anggaran dana desa diatur secara khusus didalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

Factor pendukung dalam melaksanakan pengeolaan anggaran dana desa pada Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan anggaran dana desa cukup tinggi. Factor penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih dipengaruhi oleh tingkat SDM oleh aparatur dan penyelenggara desa serta masih rendahnya swadaya masyarakat, padahal swadaya masyarakat merupakan pendapatan asli desa yang sah. kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminanan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dinilai yang masih cukup kurang.

KATA KUNCI: KEPALA DESA - ANGGARAN DESA

ABSTRACT

BASIR ILYAS. Student ID Number 221413006. 2018. The Role of The Chief Village In Managing the Village Budget (A case study in Tanjung Buaya Village, Bolangitang Sub-district, Bolmut District). The principal supervisor is Dr. Jusdin Puluhulawa, M.Si., and the co-supervisor in Roni Lukum, S.Pd., M.Sc. Department of Pancasila and Civics Education, Faculty of Social Science, State University of Gorontalo.

This research aims at investigating and analyzing the role of the chief village in managing the village budget in Tanjung Buaya village, Bolaang Itang Barat, Bolaang Mongondow Utara District, as well as investigating and analyzing the problems in managing the budget.

The result shows that the role of the chief village in managing the budget has been running effectively. The budget has been regulated explicitly in law number 6 of 2014, and government regulation number 43 of 2014 about village governance.

The supporting factor in running the budget management is the social engagement in the planning and implementation process. Meanwhile, the problems in managing the budget are the human resources in the village government and the lack of community participatory budget whereas it is the legitimate village income. The lack of community participatory budget is the reflection of community welfare.

KEYWORDS: CHIEF VILLAGE, VILLAGE BUDGET

